



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dibutuhkan kebijakan dan strategi dari pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan termasuk target dan indikator yang akan dicapai yang tertuang dalam rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

MAI E

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
4. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah rencana tahunan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

PARAF KOORDINASI
A I E

Pasal 3

- (1) RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024
BAB III : RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025
BAB IV : PENUTUP
- (2) RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan, Bupati membentuk tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI
A A I G

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha,
pada tanggal 11 AGUSTUS 2025

BUPATI KONAWE,






YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaha
pada tanggal 11 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 704

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Anisa	
3	KA. BAPPEDA	
4	Kabag Hukum	
5	KABID PPM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah Tanpa Kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Konawe Tahun 2025, sesuai Keputusan Bupati Konawe Nomor : 400.9.14/497 Tahun 2025. Tugas Tim tersebut adalah memberikan dukungan administrasi teknis, memberikan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan, agenda kerja tahunan serta bahan kebijakan lainnya yang terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.

TKPK Kabupaten Konawe diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan daerah sehingga target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan dapat tercapai.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan TKPKD Kabupaten Konawe dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2025;
2. Memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan rencana aksi serta pelaksanaan koordinasi dalam implementasi intervensi program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2025;
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Memberikan gambaran harapan yang akan datang dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan analisa dan konsolidasi internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Konawe;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Kabupaten Konawe;
3. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Konawe Tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor : 611).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

- 2.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Konawe
- 2.2. Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

BAB III RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN 2025

- 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025
- 3.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025
- 3.3. Faktor Pendorong dan Hambatan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II
EVALUASI KINERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

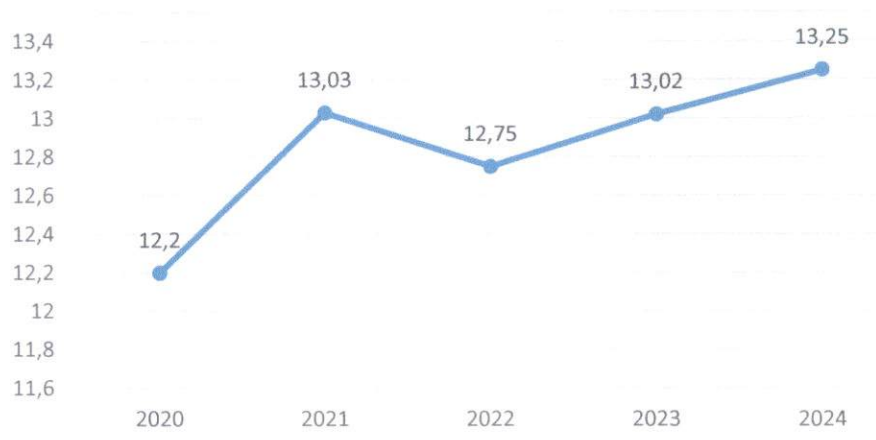
2.1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Konawe

A. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal. Sehingga berdampak buruk terhadap pemenuhan standar hidup lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami trend peningkatan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

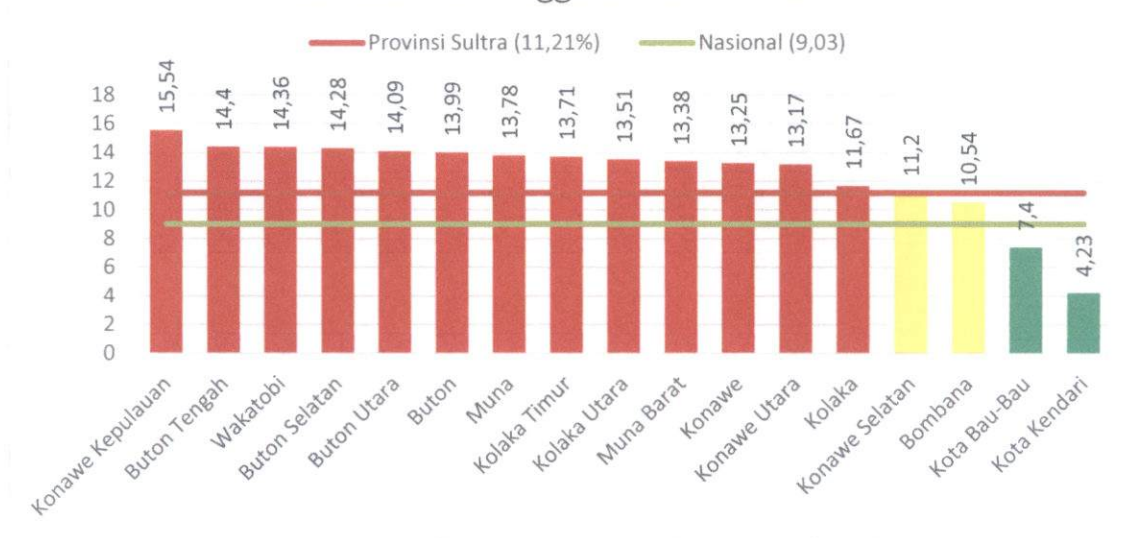
Gambar 2. 1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, data diolah

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe mengalami kenaikan sebesar 13,25% atau naik sekitar 1,05% sejak tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, posisi relatif persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe sebesar 13,25% masih berada pada zona merah, yaitu berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara (11,21%) dan diatas rata-rata Nasional (9,03%). Posisi relatif persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2024



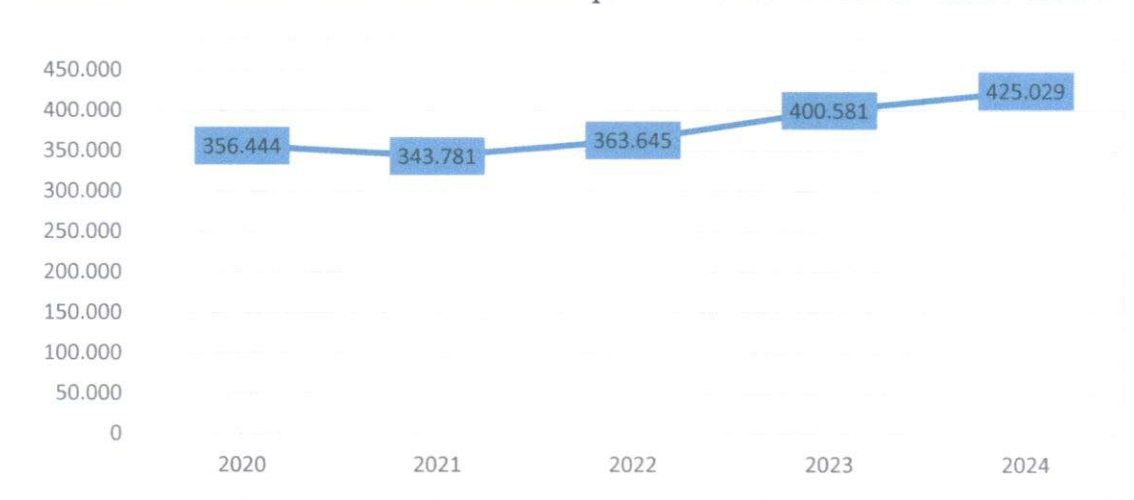
Sumber : BPS Kabupaten Konawe, data diolah

Gambar diatas menunjukkan rata-rata posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Konawe berada pada posisi ke-11 dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Kabupaten Konawe dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.3

Gambar 2. 3 Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, data diolah

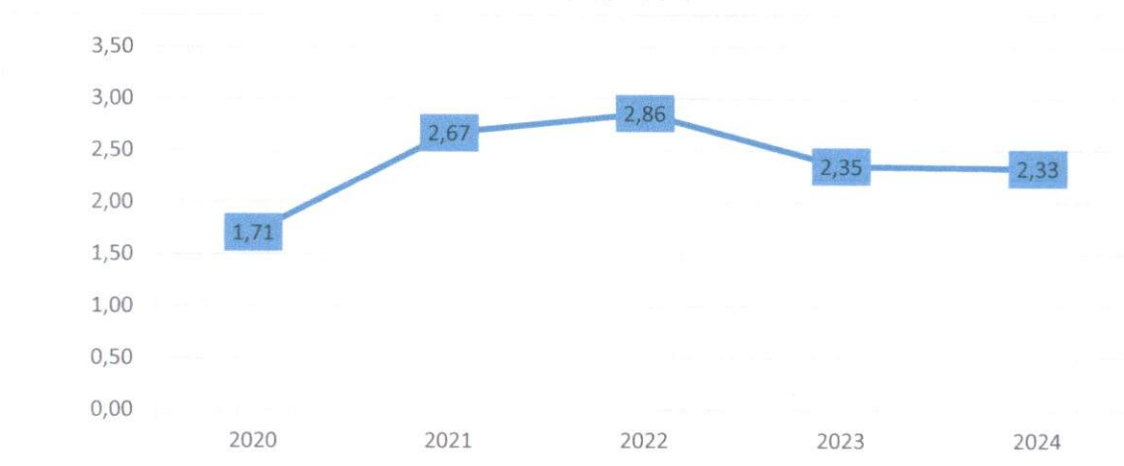
Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Selain itu perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dll menjadi Komoditas Bukan Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

Garis kemiskinan Kabupaten Konawe pada tahun 2024 sebesar Rp. 582.392, hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar Rp582.392. Penduduk di Kabupaten Konawe dikatakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Konawe tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2. 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, data diolah

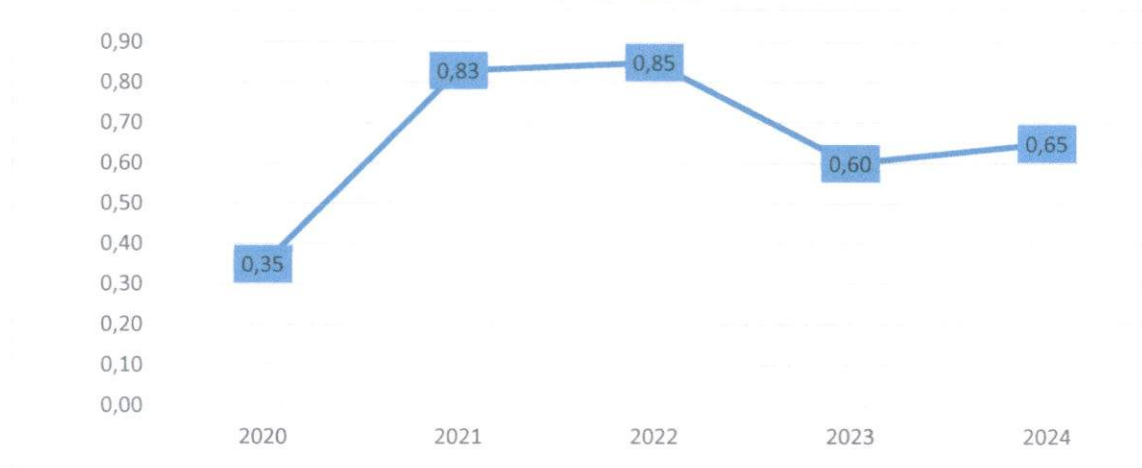
Gambar 2.4 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Konawe tahun 2023 sebesar 2,35 mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi 2,33 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhannya.

Jika dilihat dari indeks kedalaman menggambarkan bahwa rata2 kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan menurun yang mengindikasikan bahwa rata2 pengeluaran penduduk cenderung makin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

D. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Konawe dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, data diolah

Gambar 2.5 menunjukkan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Konawe tahun 2023 sebesar 0,60 mengalami peningkatan sebesar 0,05 menjadi 0,65 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Konawe.

Jika dilihat dari indeks keparahan terjadi peningkatan, ini memberikan informasi bahwa penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

2.2 Evaluasi Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 103.783.071.835. Anggaran tersebut melalui intervensi Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Matriks Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengeolaan Pendidikan	Persentase Rata-rata Pelayanan Pendidikan Anak Usia 5-21 Tahun	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Wilayah Kabupaten Konawe	Ruang	55	5.473.532.000	55	5.153.053.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Harapan Lama Sekolah			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas		Unit	50	22.053.894.729	45	21.905.503.387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							as Sekolah	Sekolah yang Telah Dibangun								
							Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personal Peserta Didik		Peserta Didik	500	80.000.000	500	80.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Penyediaan Biaya Personal	Jumlah Peserta Didik		Peserta Didik	250	40.000.000	250	40.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							
							Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		Peserta Didik	1775	193.162.500	1775	184.988.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Rehabilitasi	Jumlah		Ruang	60	17.565.240.000	60	17.445.714.562	Dinas Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							si Seda ng/B erat Ruan g Kelas Sekol ah	Ruang kelas sekola h yang Telah Direha bilitasi Sedan g/Bera t							kan dan Kebuda yaan
							Reha bilitasi Sedan g/B erat Sara na, Prasa rana dan Utilit as Sekol ah	Jumla h Sarana , Prasar ana dan Utilita s Sekola h yang Telah Direha bilitasi Sedan g/Bera t		Unit	245	2.208.595.271	245	2.200.530.000	Dinas Pendidika n dan Kebuda yaan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Menurunnya Angka Kemiiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Anak Terlantar dan Fakir Miskin	Pemantauan Terhadap Pelakhsanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpeliharaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Konawe	Orang	1	7.062.200	60	7.062.200	Dinas Sosial
							Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang	1	135.957.500	9000	135.957.500	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengan-tasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga	1	5.098.700	9000	5.098.700	Dinas Sosial
							Penjagaan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	16.398.200	60	16.398.200	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	11.945.600	60	11.945.600	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Orang	1	22.416.500	30	22.416.500	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
						usia Terlantan Dan Gelandangan Penge mis Yg Terpen uhi Kebut uhan Dasar nya Di Luar Panti (Indika tor SPM)		Kewen angan Kabup aten/K ota								
						Pemb erian Bimb ingan Sosia l kepa da Kelua	Pemb erian Bimb ingan Sosia l kepa da Kelua	Jumla h Pesert a dalam Pembe rian Bimbi ngan			Orang	1	12.458.000	65	12.458.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							rga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendaatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	5.077.600	60	5.077.600	Dinas Sosial
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendaatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan		Orang	1	6.556.400	25	6.556.400	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								angan Kabupaten/Kota							
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	6.366.400	20	6.366.400	Dinas Sosial
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat		Orang	1	20.697.700	15	20.697.700	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
								Bantuan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemanfaatan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar		Orang	1	11.750.300	60	11.750.300	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								Panti Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten		Orang	1	87.935.300	450	87.935.300	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								aten/Kota							
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	21.043.800	250	21.043.800	Dinas Sosial
					Program Penanganan	Persentase Korban	Pelayanan DUKUNGAN	Jumlah Korban		Orang	1	8.489.900	80	8.489.900	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					an Bencana	Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Psikososial	Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota							

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	1	14.932.200	80	14.932.200	Dinas Sosial
							Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari		Orang	2	202.099.300	500	202.099.300	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								dalam Masa Tanggap Darurat (Pungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia		Orang	2	80.300.000	350	80.300.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								pada Masa Tanggap Darurat (Pungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Penyediaan Tempat Pungsi	Jumlah Tempat Pungsi Kewenangan Kabupaten/Kota		Unit	1	20.774.700	25	20.774.700	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (Kat) Yang Sejahtera	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	1	16.205.300	50	16.205.300	Dinas Sosial
						Peningkatan Kemampuan Potensi	Peningkatan Kapasi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasi		Orang	1	9.420.300	60	9.420.300	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	tas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan		Lembaga	1	24.869.200	15	24.869.200	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	1	13.526.700	40	13.526.700	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							rga Kewenangan Kabupaten / Kota									
3	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Wilayah Kabupaten Konawe	Orang	1500	704.785.000	1500	540.351.140		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
						Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan									
						Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar		Laporan	1	133.217.300	1	131.697.300	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Kerja serta Pengupahan	sebagai Peserta Jamso stek serta Pengu pahan							
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		Lembaga	6	119.460.000	6	119.210.069	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
							Proses Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat		Orang	16	200.000.000	48	199.100.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klast er Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n								
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Yang Terbangun	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekit	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah		Kepala Keluarga	15	39.999.900	15	39.999.900	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							ar Lokasi Kawasan Transmigrasi	dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Tetap (TPS)							
							Penyediaan Lingkungan Baru Trans	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang		Kepala Keluarga	25	79.414.900	25	78.316.700	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							migran di Kawasan Transmigrasi	Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Perumahan Transmigrasi							
							Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		Kepala Keluarga	25	425.000.000	25	373.385.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					Program Penerimaan	Persentase Tenaga Kerja Yang	Penyediaan Unit Laya	Jumlah Tenaga Kerja Disabil		Orang	5	10.000.000	5	10.000.000	Dinas Transmigrasi dan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
					Tenaga Kerja	Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	nan Disabilitas Ketenagakerjaan	itas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD								Tenaga Kerja
							Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan		Orang	50	21.934.100	50	19.534.100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								Kesempatan Kerja							
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Administrasi Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	291	50.005.650	291	50.005.650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Dokumen	291	31.201.950	291	30.336.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Penganbangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen	1	24.637.900	1	16.824.350	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Dokumen	1	3.485.676.950	1	3.470.676.550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Dokumen	6	34.334.750	6	34.151.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Program Pemberdayaan Usaha Meneh, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wiraswasta	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Wilayah Kabupaten Konawe	Usaha Mikro	60	1.529.945.000	60	1.529.945.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					(Umk m)										
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			Populasi Ternak Sapi	Program Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Pertanian	Persentase Prasarana Yang Digunakan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbaranya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbaranya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Wilayah Kabupaten Konawe	Ton	8	102.550.000	8	102.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Penjaminan Peredaran HPT, Baha	Jumlah HPT, Bahan Pakan /Pakan yang		Ton	14	128.937.500	13	128.375.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							n Pakaian/Pakaian	Beredar								
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Sdm Kelompok Tani Ternak	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Unit	1	161.878.700	15	161.878.700		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			Produk Padi	Program Penyelesaian Dan Pengembangan	Persentase Kelompok Tani Yang Diberi Bantuan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peme	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi	Wilayah Kabupaten Konawe	Unit	0	199.038.000	1	189.560.000		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian	liharan Jalan Usaha Tani	dan Dipelihara							Perkebunan
					Program Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Diberi Bantuan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Laporan	1	14.342.000	1	3.706.350	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
8	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			Produksi Perikanan	Program Peningkatan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan	Wilayah Kabupaten Konawe	Kelompok	4	17.497.000	4	17.497.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							n, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	an Pendaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya							
							Pengembangan Kapasitas Pemudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		Kelompok	40	623.064.000	40	593.064.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Penjanaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit	25	521.494.945	14	521.374.000	Dinas Perikanan
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan		Unit	5	1.564.270.000	5	1.564.090.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan			Unit Usaha	6	10.056.000	6	10.056.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Usaha	Usaha							
							Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya		Kelompok	5	9.731.300	5	9.731.300	Dinas Perikanan
							Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat		Orang	50	410.663.000	50	22.585.500	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
								Kapasitasnya								
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		Unit	15	191.610.000	15	191.510.000		Dinas Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Olahan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil		Dokumen	1	15.059.600	1	14.859.600		Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							olahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko								
							Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan		Ton	800	107.805.500	400	107.805.500	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku Usaha	0	196.700.000	2	196.700.000	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							m 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	aten/Kota yang Terfasilitasi							
9	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi Kabupaten/Kota Yang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menukar dan Tidak Menukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menukar dan Tidak Menukar	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	30	1.839.077.494	30	1.493.334.000	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dikumen	0	7.653.912.000	30	6.487.208.557	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	2422	92.450.000	2422	92.322.900	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	0	35.000.000	3304	35.000.000	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang	26	343.010.000	26	343.010.000	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen	29	826.065.000	29	784.309.000	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		Orang	6459	125.979.000	6459	125.979.000	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							eksi HIV	Standar								
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang	0	25.000.000	726	25.000.000	Dinas Kesehatan	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan		Orang	21439	25.000.000	21439	25.000.000	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							Lanjutan	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang	1709	366.600.000	1709	366.600.000	Dinas Kesehatan	
							Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penderita		Orang	32455	35.000.000	11356	35.000.000	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							anan Kesehatan Pend erita Hipertensi	Hipertensi yang Menda patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa r							
						Persen tase RS Rujuk an Tingka t Kabup aten/Kota Yang Terakr editasi	Penge lolaa n Jami nan Kese hatan Masy arakat	Jumla h Doku men Hasil Pengel olaan Jamin an Keseha tan Masya rakat		Dok ume n	1	533.327 .822	1	533.327 .822	BLUD RSUD
						Persen tase Fasilit	Penge lolaa n	Jumla h Ibu Hamil	Wilaya h Kabup	Fas kes	29	583.029 .000	29	490.210 .000	Puskes mas

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
						as Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	aten Konawe							
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Fas kes	29	224.941.000	29	177.829.000	Puskesmas	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Menda		Fas kes	29	2.345.800.950	29	1.976.824.950	Puskesmas	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							Usia Pendidikan Dasar	patkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Fas kes	29	448.145.000	29	406.375.000	Puskesmas	
							Pengelolaan	Jumlah Orang		Fas kes	29	140.415.000	29	105.745.000	Puskesmas	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terduga Mendrita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen	29	575.938.050	29	559.899.050	Puskesmas

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen	29	5.762.740.600	29	5.065.406.890	Puskesmas
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan		Dokumen	29	14.388.407.275	29	10.494.135.564	Puskesmas

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								Masyarakat							
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Prevalensi Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Pendaftaran Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin / kelahiran)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin / kelahiran, Badut a / Balita) yang menda	Wilayah Kabupaten Konawe	Laporan	353	1.164.900.000	353	1.164.900.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							, Baduta/Balita)	pat pendampingan								
11	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan ketahanan Bencana	Meningkatkan Ketahanan daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Wilayah Layanan Penanggulangan Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Wilayah Kabupaten Konawe	Keluarga	100	52.669.600	100	52.669.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,		Orang	29	173.514.500	29	173.514.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							an Bencana Kabupaten /Kota	Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana								
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi		Orang	29	390.055.600	29	386.740.900		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
								asi Korban Bencana							
							Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh		Orang	250	97.148.500	250	97.148.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Bencana)	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	2	268.294.600	1	268.294.600	Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							(satu) Daerah Kabupaten / Kota								
							Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Dokumen	2	16.033.300	1	16.033.300	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan	Persentase Peningkatan Diversi	Pembudayaan Masyarakat	Jumlah Pembudayaan		Laporan	2	360.607.500	8	360.607.500	Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
					Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	terdapat Penggerak Araga Man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok Masyarakat dalam Penggerak Araga Man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Ton	2	551.174.000	30	551.174.000		Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
							paten /Kota									
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mewujudkan tata kelola dan kualitas pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Wilayah Kabupaten Konawe	Layanan	1	370.444.000	4	370.444.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		Dokumen	1	32.886.000	1	32.885.650	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Dokumen	1	1.507.000	1	1.507.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
14	Kecamatan				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemb	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	1	40.299.500	1	40.299.300	Kecamatan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
						Yang Terlaksana	erdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
15	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat	Meningkatnya Akses infrastruktur wilayah untuk mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masy	Indeks Pemakaian Infrastruktur	Program Kawasan Perumahan	Persentase Kawasan Perumahan Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/ Kota Yang Ditangani	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Wilayah Kabupaten Konawe	Unit Rumah	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			araka t												
					Program Pengelolaan Dan Peningkatan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memeroleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		Rumah Tangga	700	5.357.096.700	700	4.767.926.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Dan Peningkatan	Persentase Jumlah Rumah Tangga	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum		Liter /Detik	500	9.606.002.470	300	6.353.574.194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
						h Kabupaten/Kota									
					Program Peningkatan Perumahan	Persentase Hunian Untuk Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Dokumen	4	24.992.200	4	24.992.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		Unit Rumah	20	199.984.600	4	199.984.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Perencanaan Jalan Dan Prasarana Lalulintas Angkutan Jalan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Wilayah Kabupaten Konawe	Laporan	1	9.960.000	1	9.960.000	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
						(LLAJ) Yang Layak	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan	Meningkatkan keamanan dan kualitas	Indeks Kabupaten layak huni aspek lingkungan	Program Peningkatan Sistem Data	Persentase Opd Penyedia Data Terpilah	Penyediaan Data Gender dan Anak di	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	2	40.000.000	1	38.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Urusan Pemerintahan / Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2024		Realisasi 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Perlindungan Anak		wilayah		Gender Dan Anak	Gender Dan Anak	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Tersedia							

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Dinas Sosial, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pemberdayaan Sosial.
3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, melalui Program Hubungan Industrial, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Program Penempatan Tenaga Kerja.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Program Peningkatan Kerjasama Desa.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian.
7. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8. Dinas Perikanan, melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
9. Dinas Kesehatan, melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui Program Penanggulangan Bencana
12. Dinas Ketahanan Pangan, melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Pogram Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
13. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengembangan Perumahan.
15. Dinas Perhubungan, melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
17. Kecamatan, melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB III
RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2025

3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025

Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe mengacu pada Permendagri 53 Tahun 2020, dimana penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - a) Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial;
 - b) Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah;
 - c) Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia;
 - d) Melibatkan multipihak, komunitas universitas dan swasta;
 - e) Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta Kelahiran, dsb).
2. Peningkatan pendapatan masyarakat.
 - a) Membuka akses pada pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak;
 - b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c) Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM;
 - d) Menyediakan dan mempermudah akses pembiayaan UMKM.
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
 - a) Peningkatan akses layanan dasar;
 - b) Meningkatkan kenotifitas antar wilayah;
 - c) Mendorong konvergensi anggaran;
 - d) Memastikan konsolidasi program
 - e) Meningkatkan kerjasama multi pihak.

3.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan menjadi bahan untuk pemetaan kondisi kemiskinan. Kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak hanya terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial. Strategi penanggulangan kemiskinan yang menasar secara langsung, tidak langsung maupun dari unsur penunjang di Kabupaten Konawe melalui program-program antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Penanganan Kerawanan Pangan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
9. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
13. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
14. Program Administrasi Pemerintahan Desa
15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
16. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
17. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
18. Program Pengelolaan Pendidikan
19. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
20. Program Pengelolaan Pelayaran
21. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
22. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
23. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
24. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
25. Program Kawasan Permukiman
26. Program Pengembangan Perumahan
27. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
28. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
29. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
30. Program Penyuluhan Pertanian
31. Program Pemberdayaan Sosial
32. Program Penanganan Bencana
33. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
34. Program Rehabilitasi Sosial
35. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
36. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
37. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
38. Program Penyuluhan Pertanian
39. Program Hubungan Industrial
40. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
41. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
42. Program Penempatan Tenaga Kerja
43. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
44. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, dengan rencana anggaran sebesar Rp.133.468.072.171,- yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, yaitu :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Ketahanan Pangan
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

15. Dinas Sosial

16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

17. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Kabupaten Konawe dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemerataan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Rata-rata Pelayanan Pendidikan Anak Usia 5-21 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wilayah Kabupaten Konawe	Persen	100	6.370.488.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Harapan Lama Sekolah			Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan		Persen	100	3.528.083.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
								pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar		Persen	100	45.170.566.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Persen	100	14.685.622.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi Kabupaten/Kota Yang	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Wilayah Kabupaten Konawe	Fas kes	32	28.335.000	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Fas kes	32	9.513.429.000	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Terakreditasi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Konawe	Fas kes	29	26.393.072.083	Puskesmas
3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pemerataan Ekono	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal	Wilayah Kabupaten Konawe	Rumah Tangga	240	19.721.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
		Melalui Pengembangan Potensi Lokal Dan Inovasi Teknologi	mi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif			Pada Anak Terlantar dan Fakir Miskin		sementara yang dimiliki sesuai standar					
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi		Rumah Tangga	16000	11.508.500	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten/Kota	asi dan Tervalidasi					
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yg Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Orang	928	177.627.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
						(Indikator SPM)							
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		Orang	715	89.439.000	Dinas Sosial
					Program Penanganan	Persentase Korban Bencana Alam	Perlindungan Sosial Korban Bencana	Jumlah tempat penampungan		Kecamatan	7	317.746.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Bencana	Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	pengungsi yang dimiliki					
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (Kat) Yang Sejahtera	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ditangani		Keluarga	120	23.918.000	Dinas Sosial

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Orang	178	24.871.000	Dinas Sosial
4	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase Kasus perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang tertangani	Wilayah Kabupaten Konawe	Persen	24	768.799.924	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
						Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan	Kabupaten /Kota						
						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan perusahaan		Dokumen	1	70.854.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Laporan	6	5.062.500	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Terintegrasi Dan Terverifikasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Areal Pencadangan		Lokasi	600	116.038.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar		Orang	24	24.907.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
						(Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja		di kab/kota					
							Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Mendapatkan Perlindungan		Orang	60	5.790.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wiraswasta	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru	Wilayah Kabupaten Konawe	Usaha Mikro	1	366.305.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Usaha Mikro (Ukm)		Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						Perdagangan
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembina	Wilayah Kabupaten Konawe	Organisasi	63	1.270.800.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	an ketahanan dan kesejahteraan keluarga					
7	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses	Wilayah Kabupaten Konawe	Kelompok	96	132.507.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
								iptek dan informasi /dan penguatan kelembagaan) pada tahun					
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Laporan	73	114.600.000	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan		Kelompok	10	37.574.500	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Kinerja	Pagu		
								/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi /dan penguatan kelembagaan)						
					Program Pengolahan Dan Pemasaan Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Olahan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah bahan baku industri pengolahan hasil perikanan			Ton /Tahun	2	56.660.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten / Kota						
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Yang Digunakan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	Wilayah Kabupaten Konawe	Unit	11	1.741.848.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian Terhadap Peternak Dan Kelompok Ternak	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan ketersediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak		Laporan	11	192.300.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten/Kota						
							Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah sarana peternakan yang tersalurkan kepada kelompok ternak		Paket	3	92.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Sdm Kelompok Tani Ternak	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti penyuluhan		Kelompok	35	111.987.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Penanggulangan Bencana	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas yang dikendalikan dari bencana pertanian	Wilayah Kabupaten Konawe	Ha	300	28.838.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Diberi Bantuan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan sarana pertanian		Kelompok	240	3.740.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapa		Kelompok	200	3.870.145.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikul

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
						Mendapatkan Penyuluhan Pertanian		tkan Penyuluhan Pertanian					tura dan Perkebunan
10	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Partisipatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	8	20.072.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran		Dokumen	2	45.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
						an Penduduk		Penduduk					Catatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Dan Penyajian Data Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		OPD	62	5.880.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi		Laporan	3	5.390.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
								Kependudukan					
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan Yang Diperbarui Setiap Tahun	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang disusun		Dokumen	2	5.390.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
11	Kecamatan				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Administratif Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Wilayah Kabupaten Konawe	Produk	28	53.941.200	Kecamatan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat Ketahanan Sosial Dan Budaya Masyarakat Dengan Melestarian Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Tradisional, Dan Kerukunan Antar Umat Beragama.	Terwujudnya Keluarga Berkeadilan, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Opd Penyedia Data Terpilah Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Profil anak	Wilayah Kabupaten Konawe	Dokumen	3	21.380.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang	Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Jumlah Wilayah rawan Pangan Yang Ditangani	Wilayah Kabupaten Konawe	Desa/Kelurahan	2	26.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
		Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Berkelanjutan	msi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		Rawan Pangan	Kabupaten/Kota						
							Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan		Dokumen	1	15.320.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang		Produk	2	2.414.197.000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kecukupan Gizi	beragam dan bergizi seimbang					
							Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Laporan	4	799.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
14	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resilien terhadap	Indeks Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Wilayah Layanan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Wilayah Kabupaten Konawe	Orang	66000	56.917.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
			Bencana					sesuai jenis ancaman bencana					
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan		Orang	2	50.775.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	300	341.203.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antara Desa Dan Kota	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Antar Desa melalui Pengurangan Kesenjangan Antara Desa Tertinggal dan Desa Berkebang/Maju	Indeks Desa Membangun (IDM)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Administrasi Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Wilayah Kabupaten Konawe	Desa	291	205.317.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan	Persentase Peningkatan	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan		Lembaga	5	1.686.796.100	Dinas Pemberdayaan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	akatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan					Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten/Kota						
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	25	19.386.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah	Rasio Konektivitas Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Wilayah Kabupaten Konawe	Rumah Tangga	2250	4.389.660.402	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Dan	Persentase Jumlah Rumah Tangga	Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah unit rumah yang		Unit	1	2.287.622.912	Dinas Pekerjaan Umum

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	sudah Terkases air minum					dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan		Pengelolaan SDA dan Bangunan	Luas kawasan permuki		KM	13	229.990.600	Dinas Pekerjaan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Sumber Daya Air (SDA)		Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	man dan areal persawahan yang terlindungi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)					Umum dan Penataan Ruang
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan		Daerah Irigasi	57	3.491.406.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten/Kota	peliharaan (ha)					
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/Kota Yang Ditangani	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Wilayah Kabupaten Konawe	Ha	2	21.030.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	30	637.685.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program Pengembangan	Persentase Hunian Untuk	Pembangunan dan Rehabilitasi	Jumlah unit rumah		Unit	60	560.699.700	Dinas Perumahan dan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
					Perumahan	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	si Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi					Kawasan Pemukiman
							Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dookumen Hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen	5	8.626.950	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
								n/Kota yang disusun					
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Lokasi	20	675.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) Yang Layak	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	Wilayah Kabupaten Konawe	Unit	5	21.400.000	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Satuan	Target 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Kinerja	Pagu	
							Kabupaten/Kota						
					Program Pengelolaan Pelayaran		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Unit	1	7.000.000	Dinas Perhubungan

Dari tabel 3.1 dapat diketahui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
5. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
6. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
7. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
8. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
9. Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
12. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
13. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
14. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
15. Pembangunan Prasarana Pertanian
16. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
17. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
18. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
19. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
20. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
21. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
22. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
23. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
24. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
25. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
26. Penataan Pendaftaran Penduduk
27. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
28. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
29. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
30. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
31. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
32. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
33. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
34. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
35. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
36. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

37. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
38. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
39. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
40. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
41. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
42. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
43. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
44. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
45. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
46. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
47. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
48. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
49. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
51. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
52. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
53. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
54. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
55. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
56. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
57. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
58. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
59. Penyusunan Profil Kependudukan
60. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
61. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
62. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
63. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

3.2 Hambatan dan Tantangan terhadap Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe yaitu :

1. Belum adanya Akses ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data untuk Pemerintah Daerah dalam memverifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
2. Belum Optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Adapun Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe antara lain :

1. Masih adanya Perbedaan data dan persepsi antar Perangkat Daerah Pengampu Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam menginterpetasikan Kepala Keluarga dan Individu miskin, termasuk juga perbedaan Fokus dan Locus pada penanggulangan kemiskinan yang akan mengakibatkan potensi tumpang tindih dan kurang efektif antar program dan kegiatan.
2. Belum optimalnya Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kondisi saat ini penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan kinerja masih dikerjakan oleh level kasubag dan jabatan pelaksana serta masih terdapat level administrator yang belum berkontribusi terhadap penyusunan perencanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Program yang diluncurkan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pemberian bantuan harus diarahkan pada penerapan bantuan bersyarat, misalnya penerima manfaat berkewajiban mengikuti Pelatihan Kerja, Anak Usia Sekolah, atau Bantuan untuk mendukung kelangsungan Usaha Produktif lainnya.
4. Distribusi Anggaran Pemerintah Daerah yang tidak merata dalam hal jumlah belanja Pegawai dan jumlah belanja untuk bantuan sosial.

BAB IV PENUTUP





4.1 Kesimpulan

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam penanggulangan kemiskinan tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2025, yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta arahan perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe.

4.2 Saran

Perlu ada komitmen dan kepedulian dari semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe.



PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Asisya II	
3	KA. BAPPEDA	
4	Kabang Hukum	
5	KABID PDM	